 **JURNAL BASICEDU**

Volume x Nomor x Bulan x Tahun x Halaman xx

*Research & Learning in Elementary Education*

*https://jbasic.org/index.php/basicedu*

**ANALISIS KURIKULUM MERDEKA PADA DAERAH 3T DI ERA REVOLUSI 4.0**

**Amalia Dwi Pertiwi¹, Puji Ayu Handayani², Deti Rostika³.**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: [amaliadwip@upi.edu](mailto:amaliadwip@upi.edu) 1, [pujiayuhandayani08@upi.edu](mailto:pujiayuhandayani08@upi.edu) 2, [derosti@upi.edu](mailto:derosti@upi.edu) 3

**Abstrak** (Times New Roman 11, Bold, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt)

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui serta mem ahami pelaksanaan pada proses penerapan kurikulum merdeka di daerah 3T. Dengan adanya kurikulum baru sebagai penyempurna pada kurikulum sebelumnya di harapkan dapat memperbaiki kerumpangan yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini, termasuk pada daerah 3T. Pada penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti menentukan untuk menggunakan metode kuanlitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mengambil objek penelitian berupa fenomena yang banyak menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai topik yang dibahas, peneliti melakukan kajian secara studi kasus dan literatur dengan menafsirkan pengetahuan dari berbagai perspektif peneliti. Merdeka belajar perlu memperhatikan aspek keadilan serta mutu pendidikan. Keadilan pendidikan memberikan kemungkinan yang sama untuk setiap peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan wilayah untuk memperoleh akses yang sama dan merata.)

**Kata Kunci:** *Kurikulum Merdeka; Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal); Revolusi Industri 4.0*

Abstract

This research was carried out with the aim of knowing and understanding the implementation in the process of implementing the independent curriculum in the 3T area. With the new curriculum as a complement to the previous curriculum, it is hoped that it can improve the gaps that occur in the world of education today, including in the 3T area. In this study, the researcher decided to use a qualitative method with a descriptive approach. Researchers take the object of research in the form of a phenomenon that has been the subject of much discussion lately. To find out more about the topics discussed, the researchers conducted a case study and literature review by interpreting knowledge from various perspectives of researchers. Freedom to learn needs to pay attention to aspects of justice and the quality of education. Educational justice provides equal opportunities for every student who comes from various socio-economic backgrounds and regions to obtain equal and equitable access.

**Keywords:** *Kurikulum Merdeka; Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal); Revolusi Industri 4.0*

Copyright (c) 2021 Nama Penulis1, Nama Penulis2 dst

🖂 Corresponding author :

Email : [amaliadwip@upi.edu](mailto:amaliadwip@upi.edu) 1, [pujiayuhandayani08@upi.edu](mailto:pujiayuhandayani08@upi.edu) 2 ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

HP : (081221768408/081312762658) ISSN 2580-1147 (Media Online)

Received xx Bulan 2021, Accepted xx Bulan 2021, Published xx Bulan 2021

# **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan suatu sektor terpenting terhadap kemajuan suatu bangsa, dengan tujuan untuk membentuk suatu Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga mampu untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin maju dan berkembang (Surani 2019). Mutu atau kualitas dari pendidikan itu sendiri sangat mempengaruhi mutu dari kehidupan masyarakatnya di masa ini dan di masa mendatang (Wattimena, R. A., & Herlambang 2018). Pendidikan termasuk ke dalam sektor penggerak pada bidang kebudayaan yang dapat menciptakan suatu hal yang inovatif dan kreatif. Pendidikan di Indonesia sangat penting dan dianggap suatu hal yang fundamental. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945, Aline ke-4 yang menyatakan tentang tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab suatu negara (Sherly, Dharma, dan Sihombing, 2021).

Agar memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia mencetuskan suatu program baru yaitu “Merdeka Belajar”. Merdeka belajar ini memiliki makna kemerdekaan dalam belajar, yaitu memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya serta senyaman nyamannya kepada setiap peserta didik untuk belajar dengan santai, tenang, dan menyenangkan tanpa adanya tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang dimilik oleh setiap siswa (Kemendikbud 2020).

Merdeka belajar ini memiliki konsep kebebasan, di mana guru dan siswa memiliki kebebasan dalam berpikir serta menentukan suatu pembelajaran yang akan dipilih, sehingga mampu untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri setiap individu agar mencapai tujuan pendidikan yang lebih sejahtera dan menyenangkan (Izza, Falah, dan Susilawati 2020).

Sebagai komponen utama dalam pendidikan, guru memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam menentukan serta menerapkan suatu pembelajaran di suatu sekolah, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), guru harus kreatif dan bisa memanfaatkan setiap sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Pada daerah 3T perhatian terhadap pendidikan perlu ditingkatkan lagi, kurang lebih 122 daerah Indonesia termasuk ke dalam daerah 3T. Pada daerah tersebut umumnya memiliki masalah mendasar, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, maupun kualitas pembelajarannya. Pada daerah 3T, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran serta anggaran pendidikan masih memprihatinkan dan belum tercukupi (Syafii, 2018).

Dengan adanya pendidikan di era revolusi 4.0 ini, diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang lebih kompeten dan kreatif serta dapat bersaing dengan negara lain. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan era *disruption* yaitu di mana adanya perubahan dari konvensional menjadi modern dengan menggunakan pendekatan digital. Ciri dari Inovasi pendidikan di era 4.0 ini menggunakan pendekatan *student center*, di mana siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan saja, tetapi mengembangkan pola pikir responsif peserta didik terhadap tatanan kehidupan, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas peserta didik di berbagai aspek bidang kehidupan (Tan et al. 2018)..

**METODE**

Pada penelitian kali ini, peneliti menentukan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada makna dan penafsiran juga pengetahuan dalam perspektif partisipan (Rulam Ahmadi, 2014). Menurut pendapat (Ahmadi dan Rose, 2014) penelitian kualitatif merupakan sebuah strategi Inkuiri dengan melakukan proses yang dititik beratkan pada pemahaman konsep, gejala, ciri-ciri, simbol-simbol, pencarian makna, serta deskripsi dari fenomena tertentu, yang tertuju serta multi akan metode yang disajikan dengan cara berupa naratif. Selain itu menurut pendapat (Fadli 2021) penelitian kualitatif dilakukan dengan rancangan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau dalam bentuk perhitungan melainkan mempunyai tujuan untuk mengungkap suatu fenomena secara holistik kontekstual dengan pengumpulan data dari setting atau latar secara alamiah dan menjadikan peneliti sebagai instrumen kuncinya.

Dengan metode kualitatif dan pendekatan secara deskriptif, peneliti mengambil objek penelitian berupa fenomena yang banyak menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai topik yang dibahas, peneliti melakukan kajian secara studi kasus dan literatur dengan menafsirkan pengetahuan dari berbagai perspektif peneliti. Sejalan dengan pernyataan dari (Gunawan, 2013) metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terhadap situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kurikulum Merdeka Belajar**

1. Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar

Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) meluncurkan kurikulum merdeka belajar yang merupakan suatu bentuk langkah yang diambil untuk mengevaluasi kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai Kurikulum Prototipe yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) mengemukakan bahwa kurikulum merdeka belajar memiliki pengertian sebagai suatu kurikulum pembelajaran yang tertuju kepada pendekatan bakat dan minat. Hal ini berarti bahwa para pelajar seperti siswa ataupun mahasiswa dapat menentukan apa saja pelajaran yang ingin mereka pelajari sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Hal ini seperti menilai para pelajar yang memiliki minat dan bakat yang berbeda dengan tolak ukur yang tidak sama juga.

Kurikulum merdeka adalah kurikulum berupa muatan pembelajaran intrakulikuler yang beragam, yang mana konten akan menjadi lebih optimal dengan tujuan supaya peserta didik dapat mempunyai waktu yang cukup untuk bisa mempelajari lebi dalam konsep serta memperkuat kompetensi. Guru sebagai pendidik mempunyai kebebasan dalam menentukan perangkat ajar agar pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran serta minat dari para peserta didik.

Merdeka belajar mempunyai makna kemerdekaan dalam belajar dengan kata lain yaitu memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk belajar sebebasnya dan senyamannya dengan santai, gembira dan tenang, tanpa tekanan dengan menitik beratkan perhatian pada kemampuan atau bakat alami yang dimiliki para siswa masing-masing (Kemendikbud 2020). Dikembangkan menjadi kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, kurikulum merdeka berfokus kepada materi esensial, kompetensi peserta didik, serta pengembangan karakter. Kurikulum merdeka mempunyai karakteristik utama yang mendukung proses pemulihan pembelajaran, di antaranya yaitu : difokuskan pada materi yang esensial menjadikan siswa mempunyai waktu lebih untuk pembelajaran yang mendalam untuk kompetensi dasar yaitu seperti numerasi serta literasi, kemudian pembelajaran dirancang berbasis proyek dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan soft skill serta karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila, dan selanjutnya yaitu guru memiliki fleksibilitas untuk dapat melakukan pembelajaran secara terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dari para siswa serta melakukan penyesuaian dengan konteks dan juga muatan lokal.

1. Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Sebelumnya

Penerapan kurikulum merdeka dapat digunakan mulai tahun ajaran 2022/2023 pada semua tingkat satuan pendidikan seperti TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan tinggi. Terdapat empat kebijakan pendidikan nasional "merdeka belajar" di Indonesia antara lain : 1) USBN diajdikan Assessment oleh sekolah, menilai kompetensi para peserta didik dengan tes tertulis serta wujud penilaian yang lain secara komprehensif. Pendidik atau guru serta sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar para peserta didik. 2) Ujian nasional (UN) diganti menjadi asesmen kompetensi minimum serta survei karakter dan juga tidak akan ada pengukuran dari segi penguasaan materi pembelajaran dalam kurikulum seperti yang telah berjalan dalam penilaian ujian nasional selama ini. Ujian nasional kedepannya akan dilaksanakan sebagai pemetaan kompetensi minimum numerasi serta literasi peserta didik. 3) Sebagai pendidik, guru dapat bebas menentukan, mengembangkan, membuat serta menggunakan format RPP atas prakarsa dan juga inovasi diri sendiri. RPP juga akan dipersingkat dengan hanya memuat tujuan, kegiatan, serta asessment pembelajaran. Penulisan RPP ecara efisien dan efektif bertujuan supaya guru memiliki waktu untuk dapat memfokuskan kepada penyiapan dan proses evaluasi pembelajaran dengan terarah. 4) Kemudian yang selanjutnya ialah sistem zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel. Hal ini mempunyai tujuan untuk dapat mengatasi adanya ketimpangan akses serta kualitas di berbagai daerah. Dapat digaris bawahi bahwa daerah mempunyai wewenang untuk dapat menentukan proporsi final serta menetapkan wilayah zonasi (Widya Ningsih, 2020).

Adanya kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka belajar yang mana sebagai suatu langkah evaluasi dari kurikulum sebelumnya, sudah pasti ada perbedaan-perbedaan kurikulum baru ini dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka mempunyai dua stuktur khusus yaitu, aktivitas yang bersifat intrakurikuler serta projek baik secara perseorangan maupun secara berkelompok, dimana proses penerapannya diserahkan seutuhnya kepada lembaga pendidikan maupun guru setiap mata pelajarannya. Kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 jua mempunyai perbedaan pada waktu dan jam pelajaran, yang mana pada kurikulum 2013 lebih menghitung jumlah jam pelajaran berdasarkan hitungan minggu, sedangkan pada kurikulum merdeka menghitung jam pelajaran berdasarkan tahun. Dengan dilakukannya penghitungan waktu jam pelajaran yang berdasarkan tahun ini akan mempermudah pihak lembaga pendidikan untuk dapat mengatur kegiatan pembelajaran, seperti halnya mata pelajaran yang sebelumnya belum diajarkan pada semester genap, dapat diajarkan pada semester ganjil, dan juga berlaku sebaliknya atau dengan cara menyesuaikan waktu jam pelajaran setiap tahunnya. Selanjutnya, perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 adalah tidak ada lagi dikenal istilah kompetensi inti ataupun kompetensi dasar, tetapi diubah menjadi capaian pembelajaran dengan ditandai oleh hasil yang sudah dicapai dalam bentuk penilaian sikap ataupun keterampilan peserta didik, yang mana hal ini saling terkait erat yang kemudian juga berdampak secara langsung kepada hasil kompetensi setiap peserta didik masing-masing.

Kurikulum merdeka belajar ini juga mempunyai perbedaan pada setiap tingkatan satuan pendidikan. Pada tingkat TK atau PAUD merdeka belajar memiliki makna merdeka untuk bermain, jadi penerapan kurikulum merdeka di tingkat TK atau PAUD adalah dengan mengajak anak bermain sambil belajar, hal ini tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian perbedaan di tingkat SD, dalam kurikulum 2013 di tingkat sekolah dasar, ada pemisah antar bidang studi IPA dan IPS. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, kedua bidang studi ini digabungkan menjadi satu bidang studi dengan nama Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) hal ini bertujuan sebagai langkah awal persiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian perbedaan di tingkat SMP, perbedaan mencolok antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka di jenjang ini, adalah pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) menjadi mapel wajib. Pada kurikulum sebelumnya, mapel ini hanya sebagai pilihan. Kemudian perbedaan pada tingkat SMA, perbedaannya yaitu, pada kurikulum 2013 peserta didik baru harus menentukan jurusan untuk sementara waktu, sedangkan pada kurikulum merdeka proses pemilihan jurusan atau peminatan diadakan pada saat peserta didik memasuki kelas 11 yang dilakukan dengan cara, peserta didik terlebih dahulu melakukan konsultasi antara wali kelas, guru BK serta orang tua peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu perbedaan pada tingkat perguruan tinggi, Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi terwujud dalam Program Kampus Merdeka. Pelaksanaannya pun memiliki beberapa perbedaan dengan penerapan kurikulum sebelumnya. Dalam Program Kampus Merdeka, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu di luar program studi yang ditempuhnya. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti praktik kerja (magang), pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek independen, wirausaha, menjadi asisten pengajar, juga Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk membangun desa.

**Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0**

Istilah penamaan industri 4.0 berawal pada suatu proyek yang digagas oleh pemerintah Jerman dengan tujuan sebagai upaya untuk mempromosikan manufaktur komputerisasi (Muhammad 2018). Era revolusi industri juga memiliki istilah lain yaitu revolusi digital serta era disrupsi. Disrupsi dapat juga diartikan sebagai inovasi (Kasali, 2018). Pada era disrupsi sekarang ini telah terjadi perubahan yang mendasar yang disebabkan oleh perubahan yang masif pada masyarakat di bidang teknologi pada setiap aspek kehidupan. Pada era industri 4.0 sekarang ini teknologi informasi telah menjadi dasar di dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia dewasa ini sudah memasuki era revolusi sosial industri 5.0 (Risdianto, 2019).

Sejak Abad ke 18 era revolusi arus global telah dimulai, seperti pendapat dari Prasetyo dan Trisyanti (2018) sejak abad ke 18 era revolusi global telah dimulai dengan ditandai adanya penemuan mesin uap yang membuat kemungkinan proses produksi dapat dilakukansecara dominan. Pada abad ke 18 era revolusi disebut dengan Revolusi Industri 1.0. Kemudian berganti menjadi Revolusi Industri 2.0 pada awal abad ke 19 sampai 20 ditandai adanya listrik, penemuan ini membuat biaya produksi dapat menurun. Kemudian memasuki tahun 1970-an berganti menjadi Revolusi Industri 3.0 dengan ditandai adanya tenaga komputerisasi. Seiring terus berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi peradaban juga semakin maju. Melalui sebuah rekayasa intelegensia dan internet pada tahun 2010 era globalisasi telah dikatakan memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang membuat manusia menjadi semakin mudah dalam melakukan aktivitas secara efektif dan efisien.

Menurut pendapat Wang et al. (2018), dalam Cholily, Putri, dan Kusgiarohmah (2019) paradigma revolusi yang secara terus menerus berkembang pesat dipelopori dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai pendorong adanya pembaharuan itu sendiri. Revolusi industri 4.0 dalam lingkup pendidikan ialah respon pada kebutuhan-kebutuhan di masa revolusi ini yang mana teknologi dan manusia disesuaikan sebagai tujuan agar terciptanya peluang baru dengan lebih kreatif dan inovatif (Sasikirana dan Herlambang 2020). Sejalan dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membuat tuntutan revolusi juga semakin meningkat. Dunia pendidikan juga terus dituntut untuk selalu memperbaiki sistemnya, sistem pendidikan terdiri dari pembelajaran, kurikulum, pengajaran, perkembangan peserta didik, alat belajar berupa sarana dan prasarana, serta kompetensi lulusan setiap tahunnya. Sistem pendidikan merupakan metode atau strategi yang digunakan dalam kegiatan atau proses pembelajaran dengan tujuan mencapai tujuan peserta didik agar mampu secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing. Dan di lain sisi dunia pendidikan juga mempunyai tantangan tersendiri dalam menghadapi segala perubahan ini. Karena hal ini, diperlukanlah adanya reformulasi pada proses pembelajaran di sekolah.

Dunia Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam proses membangun daya saing bangsa menjadi berkualitas serta meningkatkan masyarakat yang sejahtera. Seperti menurut pendapat Cholily et al. (2019) khususnya pada bidang pendidikan, riset & teknologi, serta pendidikan tinggi adalah faktor yang sangat penting untuk membangun daya saing bangsa dan juga meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Berjalannya Era Revolusi Industri 4.0 saat ini membuat teknologi digital adalah poin utama yang mendominasi kegiatan aktivitas manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Seperti menurut pendapat Sasongko dan Sahono (2016) pendidikan ialah merupakan suatu aktivitas manusia yang sangat penting, dimana dengan pendidikanlah manusia mendapatkan ilmu sehingga membuat manusia dapat berperilaku mulia. Dalam bidang pendidikan, guru sebagai pendidik para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang tentu saja terkait dengan bidang pendidikan, hal ini merupakan alasan agar para guru sebagai pendidik mampu membantu dan membuat siswa mampu menghadapi semua tuntutan revolusi yang terus berjalan dan meningkat.

**Karakteristik Daerah 3T**

Daerah 3T merupakan suatu daerah yang masih memerlukan penanganan khusus. Pada tahun 2014, diambil dari data Bappenas menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan diindonesia belum sepenuhnya merata. Daerah ini juga termasuk ke dalam golongan daerah yang masih memerlukan bantuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sarana prasarana dan sebagainya. Dalam tesisnya Cynthia (2009) menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami wilayah 3T yaitu belum meratanya keterjangkauan pendidikan di daerah tersebut. Tidak meratanya penerimaan dalam layanan pendidikan, serta akses yang buruk dan sulitnya kebutuhan fundamental di daerah 3T menjadi inti dari masalah dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan serta sarana yang telah tersedia. Menurut buku panduan kerja pengawasan sekolah 2017 (Kemendikbud, 2017) menjelaskan bahwasanya pengawasan sekolah khusus seperti di daerah 3T ini minimal harus membawahi 5 sekolah.

Terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh daerah 3T, khususnya pada permasalahan pendidikan, seperti kurangnya tenaga pengajar, sara prasarana yang kurang memadai, serta distribusi yang kurang seimbang. Selain itu juga muncul permasalahan lain dalam daerah 3T ini, yaitu tingginya angka putus sekolah pada anak rentan usia 10-12 tahun, serta infrastruktur yang memudahkan dalam mengikuti pendidikan dapat dikatakan sangat tidak memadai.

Usman (2014) berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang menjadi permasalahan dalam peningkatan mutu pendidikan pada wilayah 3T. yaitu, strategi pendidikan masih bersifat input oriented dan pengelolaan pendidikan bersifat macro oriented, serta diatur oleh jajaran birokrat tingkat pusat. Hal ini menjadi faktor prediksi yang terjadi di tingkat pusat tidak berjalan semestinya ditingkat sekolah. Adanya kesenjangan pendidikan di daerah 3T ini terjadi karena faktor sumber daya manusia (SDM) yang masih belum mampu mengolah suatu fenomena yang terjadi. Fenomena ini berpedoman pada peningkatan potensi guru yang belum menjadi prioritas terhadap pembangunan suatu pendidikan.

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang daerah tertinggal.

Pasal 1 :

Pada peraturan presiden dimaksudkan dengan

* Daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta penduduknya masih kurang berkembang dibandingkan pada suatu daerah lain dalam suatu skala nasional
* Menteri yaitu menteri yang menjalankan suatu kegiatan pemerintahan dalam bidang pembangunan didaerah tertinggal.

Pasal 2:

Suatu wilayah dapat dikatakan tertinggal berdasarkan dengan ketentuan berikut:

1. Perekonomian pada masyarakat
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Sarana dan Prasarana
4. Keahlian dalam mengelola keuangan suatu daerah
5. Aksebilitas
6. Karakteristik daerah.

**Problematika Pendidikan pada Kurikulum Merdeka di daerah 3T**

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, permasalahan umum dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T yaitu kurang meratanya jumlah tenaga kependidikan, distribusi yang tidak seimbang, kualifikasi yang masih beada di bawah stndar mutu, serta tidak sesuaian antar kualifikasi pendidikan terhadap bidang yang diangkat (Syafii, 2018).

Kurang meratanya sebaran pendidikan di daerah 3T menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi daerah tersebut. Kurangnya pemahaman dalam membaca juga menjadi permasalahan awal dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemerolehan pendidikan.

Kurikulum merdeka di daerah tertinggal, dalam buku tanya jawab kurikulum merdeka disebutkan profil pelajar pancasila. Profil pelajar pancasila ini merupakan lulusan yang bertujuan agar menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan. Kegiatan dalam pembelajarannya berupa kajian, diskusi, metode penguatan fisiik, penelitian, dan mental serta pembelajaran berbasis proyek untuk menginternalisasi karakter dalam profil pelajar.

Guru sebagai tenaga kependidikan profesional memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa (Kemendikbud, 2017).

Terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang dialami oleh anak di daerah 3T, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya ketersediaan layanan pendidikan di beberapa daerah 3T.

Anak-anak wilayah 3T kerap kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan di wilayah tempat mereka tinggal. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar mereka biasanya tidak melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya karena kurangnya sekolah yang dapat dijangkau oleh mereka.

1. Minimnya akses layanan pendidikan.

Pemerataan pendidikan di Indonesia mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi di beberapa desa terpencil yang jauh dari perkotaan, hal tersebut menjadi kendala dalam mengakses pendidikan, sehingga pendidikan belum terdistribusi secara merata.

1. Kurangnya jumlah tenaga pendidik serta kependidikan.

Kurangnya jumlah pendidik serta tenaga kependidikan yang kompeten ini menjadi masalah serius dalam mengejar ketertinggalan kurikulum. Begitu juga dengan tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menjadi penghambat daerah terpencil dalam mengejar ketertinggalan.

1. Distribusi guru yang tidak seimbang.

Kurang meratanya sebaran guru di wilayah 3T menjadi permasalahan yang cukup serius. Kurangnya jumlah guru pada daerah 3T ini hanya ada di beberapa wilayah saja, di wilayah lainnya sebaran guru cukup memadai, dalam hal ini menjadi persoalan yang cukup penting untuk dipecahkan yaitu sebaran/distribusi guru.

1. Kurang kesesuaian antara kebutuhan dan penyediaan guru.

Jumlah guru yang kurang bukan semata-mata menjadi permasalahan utama yang dialami oleh masyarakat serta pemerintah di wilayah tersebut. Kualitas guru juga menjadi masalah yang penting, umumnya di daerah 3T para guru sekolah dasar hanya masuk ke dalam kelas dan mengajar dari buku tanpa membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

1. Angka partisipasi sekolah yang masih rendah.

Walaupun program wajib belajar selama 9 tahun sudah berjalan diindonesia, namun masih terdapat persoalan pendidikan yang dihadapi oleh negara idonesia, seperti banyaknya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan pada penduduk dengan rentan usia 7-15 tahun. Persoalan pendidikan ini muncul pada daerah 3T.

1. Jumlah serta kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Terdapat banyak sekali gedung-gedung sekolah yang sudah rusak dan tidak layak untuk dipakai, di berbagai tingkat pendidikan. Kurangnya pemanfaatan fasilitas, serta tidak lengkapnya media belajar menjadi tingkat penurunan literasi di pihak pelajar.

Pelatihan terhadap guru yang dilakukan oleh pusat yang tidak sempurna menyebabkan guru kurang memahami hasil pelatihan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penghambat dalam melakukan pelaksanaan kurikulum merdeka, sehingga pada akhirnya guru menggunakan kembali kurikulum tradisional. Serta rendahnya guru dalam menguasai alat pembelajaran juga menjadi penghambat dalam ketercapaian kurikulum merdeka.

Dalam kurikulum merdeka ini siswa dituntut untuk dapat mengembangkan minat dan potensinya. Menurut De Bono (2015), setiap individu memiliki kemampuan untuk mengolah dirinya dalam mencapai kemajuan yang berkembang secara adaptif. Dengan kata lain, kurikulum merdeka belajar ini memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada peserta didik untuk memilih pelajaran/pembelajaran yang mereka minati. Namun yang terjadi di lapangan, masih banyak siswa yang kebingungan dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini dan berakhir pada guru yang lebih aktif pada saat melaksanakan proses pembelajaran.

**Strategi Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka pada Daerah 3T**

Kurikulum merdeka dibuat dan dirancang dengan utamanya sebagai bagian dari usaha Kemendikbudristek sebagai upaya dalam mengatasi krisis belajar yang sudah lama dihadapi yang kemudian menjadi semakin parah karena adanya pandemi. Krisis yang dimaksud disini yaitu ditandai dengan rendahnya hasil belajar dari para peserta didik, hal ini bukan hanya sekedar hasil belajar semata tetapi menyangkut hal yang mendasar seperti literasi membaca. Selain itu krisis belajar juga ditandai dengan adanya ketimpangan kualitas belajar yang sangat lebar antar wilayah serta antar kelompok sosial ekonomi. Sudah jelas bahwa pemulihan sistem pendidikan dari krisis belajar tidak dapat diwujudkan dengan hanya perubahan kurikulum saja. Tetapi diperlukan juga berbagai usaha dan upaya penguatan kapasitas maupun kompetensi para pendidik serta kepala sekolah. Seperti pendapat Suraji (2012) sebaik dan selengkap apapun kurikulum dan sarana prasarana yang disediakan namun tanpa guru yang berkompetensi dan berkualitas akan sulit utuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kompetensi yang harus dimiliki para pendidik diantaranya yaitu mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalisme (Juniantari and Sri 2017). Selain itu hal lainnya seperti penataan sistem evaluasi, pendampingan bagi pemerintah daerah dan infrastruktur pendanaan yang lebih adil. Tetapi kurikulum juga mempunyai peran yang sangat penting. Karena kurikulum memiliki pengaruh besar pada apa yang diajarkan oleh pendidik atau guru dan juga pada aspek bagaimana materi pembelajaran tersebut akan diajarkan kepada para peserta didik. Karena hal inilah kurikulum yang dirancang dengan baik akan dapat mendorong dan mempermudah para pendidik agar mengajar dengan cara yang lebih baik.

Dalam setiap penerapan kebijakan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang senantiasa mengiringi. Demikian halnya dengan penerapan Kurikulum Merdeka pada berbagai tingkat satuan pendidikan. Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini adalah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplorasi diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Meski begitu, penerapan Kurikulum Merdeka tak lepas dari berbagai kekurangan. Misalnya, persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kurikulum ini.

Kompetensi sumber daya manusia untuk adanya peluncuran kurikulum merdeka ini dinilai belum siap. Penerapan kurikulum merdeka ini memang dilaksanakan secara terbuka, dengan kata lain penerapannya diserahkan kepada setiap sekolah masing-masing yang ingin menerapkan kurikulum baru ini atau masih tetap menggunakan kurikulum lama. Hal ini membuat suatu pertanyaan muncul, bahwa hingga kapan hal ini akan terus berlangsung, apakah adanya kebijakan baru hanya bisa diikuti bagi yang mampu dan sudah memenuhi standar kompetensi, tanpa adanya dorongan bagi pihak lain yang belum memenuhi standar kompetensi. Dan apakah hal ini akan terus berjalan seperti ini dengan terus bermunculannya kebijakan baru nanti, dimana hanya akan diikuti oleh sebagian pihak saja, ataukah kebijakan baru akan menunggu semua pihak untuk bisa mengikuti kebijakan baru yang tertinggal, dan lagi-lagi pertanyaannya adalah sampai kapan waktu yang dibutuhkan.

Penerapan merdeka belajar merupakan suatu terobosan dari Kemendikbud-ristek untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan melalui kebijakan yang dapat memperkuat peran semua insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui empat upaya perbaikan. Yang pertama yaitu perbaikan pada faktor infrastruktur serta teknologi. Kemudian yang kedua, perbaikan prosedur, pendanaan, kebijakan, dan pemberian otonomi lebih untuk setiap tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan masyarakat, budaya, serta kepemimpinan. Selanjutnya yang keempat ialah, melakukan perbaikan asesmen, kurikulum, serta pedagogi. Adanya kebijakan dengan empat upaya perbaikan ini tidak mungkin sampai dan dapat berjalan jika para pendidik atau guru tidak mau meningkatkan kompetensinya dan menerapkannya, hal ini tentu saja termasuk usaha dalam penerapan kurikulum merdeka ini pada daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Hal ini perlu ditekankan sejalan dengan tidak meratanya sistem pembangunan pada daerah 3T, karena beberapa faktor inilah peran pendidik atau guru pada sekolah di daerah 3T sangat penting bukan hanya bagi penerapan kebijakan baru tetapi juga bagi pembangunan nasional melalui aspek edukasi.

Usman (2014) berpendapat bahwa terdapat tugas yang harus dilakukan oleh guru agar mendukung pelaksanaan merdeka belajar di antaranya yaitu : 1) Merdeka belajar perlu memperhatikan aspek keadilan serta mutu pendidikan. Lifelong learning adalah tema pusat dalam era idustri 4.0, yang mana merupakan pembelajaran secara terus menerus sepanjang hayat dengan mempunyai konsep yaitu pendidikan bisa dilaksanakan kapan dan di mana saja tanpa terbatasi oleh usia. Wardani (2018) berpendapat bahwa basic education yang memiliki mutu serta keadilan ialah merupakan suatu instrumen yang ampuh untuk dapat mewujudkannya. Konsep keadilan pendidikan memberikan kemungkinan yang sama untuk setiap peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan wilayah untuk memperoleh akses yang sama dan merata. Free dan compulsory basic education, ialah merupakan prasyarat untuk dapat mewujudkan layanan pendidikan yang adil serta bermutu. 2) Merdeka belajar terikat dengan usaha sekolah dalam menanamkan lifelong learning capacity (LLC) sebagai tema pusat revolusi industri ke-4.0. LLC akan dapat berkembang dengan pesat jika peserta didik dapat menguasai dasar numerasi dan juga literasi. Hal ini memerlukan proses pelatihan secara terus-menerus selama sekolah yang di antaranya yaitu, menulis dan menuangkan gagasan pada sebuah tulisan sederhana yang mudah dipahami dan juga santun, membaca serta memahami materi bacaan dengan cepat, menutur atau mengungkapkan gagasan secara lisan dengan sederhana dan mudah dipahami serta santun, menyimak serta menangkap isi pembicaraan dari orang lain dengan cepat dan tepat, berhitung yaitu memahami logika angka, perhitungan, ruang, dan juga bidang untuk dapat mempertajam pikiran dan praktek sehari-hari. 3) Merdeka belajar sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Mutu pendidikan bisa dikonsepsikan di antaranya yaitu, mutu dari bidang pendidikan itu sendiri yang mana meliputi mutu dari proses, outcome, input, dan output. input dari pendidikan dapat dinyatakan bermutu apabila siap berproses. kemudian proses pendidikan dapat dinyatakan bermutu jika dapat membuat suasana pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan tentunya aktif. Sementara mutu pendidikan ditentukan oleh dua faktor besar yaitu sekolah serta lingkungan itu sendiri.

**KESIMPULAN**

Kurikulum merdeka merupakan sebuah kurikulum yang hadir untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka ini dirancang dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri dan soft skill yang ada pada diri setiap siswa mulai dari jenjang sekolah dasar samapi dengan jenjang sekolah tinggi. Pada kurikulum merdeka ini juga, siswa dituntut untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Merdeka belajar juga sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan mutu pendidikan secara berkelanjutandan merdeka belajar juga terikat dengan usaha sekolah dalam menanamkan lifelong learning capacity. Yaitu pendidikan yang dilakukan sepanjang hayat, dan pendidikan dapat dilakukan dimana saja, serta kapan saja, tanpa adanya batasan usia.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa agar terlaksananya kurikulum merdeka di daerah 3T ini, maka diperlukannya pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan seimbang, sehingga mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan pendidikan di suatu sekolah, sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Selain itu juga, fasilitas sekolah atau sarana prasarana sangat mempengaruhi terlaksananya kurikulum merdeka, maksudnya dengan fasilitas yang memadai guru tidak akan merasa kesulitan dalam menerapkan kurikulum di suatu sekolah dan dengan fasilitas yang memadai juga akan memudahkan guru dalam mengejar suatu ketertinggalan pada sekolah tersebut.

Alternatif lain agar terlaksananya kurikulum merdeka ini yaitu diperlukannya ketersediaan layanan pendidikan pada daerah 3T, karena pada beberapa wilayah 3T layanan pendidikan masih sangat kurang dan belum tersebar secara merata sehingga jumlah partisipasi sekolah masih sangat rendah, hal ini menyebabkan banyaknya siswa yang tidak melaksanakan wajib belajar selama 9 tahun. Dengan tersedianya layanan pendidikan yang memadai dan merata maka penerapan kurikulum merdeka akan mudah dilakukan oleh guru, selain itu juga dengan banyaknya siswa yang dapat mengikuti wajib belajar selama 9 tahun, maka persoalan angka putus sekolah di Indonesia dapat teratasi secara menyeluruh.

Apabila beberapa strategi tersebut dapat dikembangkan dan dilaksanakan secara baik dan terstruktur, maka penerapan kurikulum merdeka pada daerah 3T dapat terlaksana dengan baik sebagaimana semestinya, sehingga sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T dapat mengikuti setiap perubahan yang ada serta dapat mengejar ketertinggalan dari sekolah yang berada di luar daerah 3T tersebut.

.

**SARAN**

Agar pengembangan kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan baik di daerah 3T ini, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Selain itu juga, seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Dan guru juga harus bisa memanfaatkan setiap potensi dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut agar pembelajaran tidak berjalan monoton, serta siswa dapat lebih aktif pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu juga pemerintah hendaknya bisa memfasilitasi sekolah-sekolah yang berada pada daerah 3T ini, agar sekolah mampu mengejar ketertinggalannya. Selain itu juga penyebaran tenaga pengajar harus bisa seimbang dengan jumlah siswanya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi, Rulam, and K. R. Rose. 2014. “Metodologi Penelitian Kualitatif.”

De Bono, Edward. 2015. *Serious Creativity: How to Be Creative under Pressure and Turn Ideas into Action*. Random House.

Cholily, Yus Mochamad, Windy Tunas Putri, and Putri Ayu Kusgiarohmah. 2019. “Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0.” in *Seminar & Conference Proceedings of UMT*.

Cynthia, Rika Aristi. 2009. “Faktor-Faktor Penyebab Siswa Lulusan Sekolah Dasar Tidak Melanjutkan Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kota Tanggerang Selatan.”

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(1):33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Gunawan, Imam. 2013. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Bumi Aksara* 143:32–49.

Izza, Aini Zulfa, Mufti Falah, and Siska Susilawati. 2020. “Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Di Era Merdeka Belajar.” *Konferensi Ilmiah Pendidikan* 1(1):10–15. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v1i1.230>

Juniantari, IGAS, and Gusti Ayu Sri. 2017. “Pentingnya Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pencapaian Hasil Belajar Siswa.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1:1–12.

Kasali, Rhenald. 2018. *The Great Shifting*. Gramedia Pustaka Utama.

Kemendikbud. 2017. “Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI*.

Kemendikbud. 2020. “Merdeka Belajar.” 1–19.

Muhammad, Yahya. 2018. “Era Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia.”

Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. 2018. “Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial.” *IPTEK Journal of Proceedings Series* (5):22–27.

Risdianto, Eko. 2019. “Analisis Pendidikan Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0.” *April, 0–16. Diakses Pada* 22.

Rulam Ahmadi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media : Yogyakarta., 2014.

Sasikirana, Vania, and Yusuf Tri Herlambang. 2020. “Urgensi Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Society 5.0.” *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* 8(2).

Sasongko, Rambat Nur, and Bambang Sahono. 2016. “Desain Inovasi Manajemen Sekolah.” *Jakarta: Shany Publisher*.

Sherly, Sherly, Edy Dharma, and Humiras Betty Sihombing. 2021. “Merdeka Belajar: Kajian Literatur.” Pp. 183–90 in *UrbanGreen Conference Proceeding Library*.

Suraji, Imam. 2012. “Urgensi Kompetensi Guru.” *Edukasia Islamika* 10(2):70284. <https://doi.org/10.30998/prokaluni.v2i0.145>

Surani, Dewi. 2019. “Studi Literatur: Peran Teknolog Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0.” Pp. 456–69 in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*. Vol. 2.

Syafii, Ahmad. 2018. “Perluasan Dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 4(2):153–71.

Tan, S. Y., D. Al-Jumeily, J. Mustafina, A. Hussain, A. Broderick, and Henry Forsyth. 2018. “Rethinking Our Education to Face the New Industry Era.” Pp. 65–66 in *Proceedings of EDULEARN 18 Conference 2nd-4th July 2018*. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1564>

Usman, A. Samad. 2014. “Meningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.” *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 15(1):13–31. <https://doi.org/10.22373/jid.v15i1.554>

Wang, C., H. Liao, H. Sun, Y. Zhang, and Z. Cao. 2018. “Micro RNA‐3064‐3p Regulates the Differentiation of Cementoblasts through Targeting DKK 1.” *Journal of Periodontal Research* 53(5):705–13. <https://doi.org/10.1111/jre.12554>

Wardani, Ratna. 2018. “21st Century Educator: Menyongsong Transformasi Pendidikan 4.0.” in *Slide Seminar Nasional Dinamika Informatika Senadi UPY*.

Wattimena, R. A., & Herlambang, Y. T. 2018. *Merancang Revolusi Pendidikan Indonesia Abad 21*.

Widya Ningsih. 2020. “Merdeka Belajar Melalui Empat Pokok Kebijakan Baru Di Bidang Pendidikan / Suara Guru Online" (Dalam Bahasa Inggris).”